

**PSPB: Kurikulum Sejarah 1984 dan Pengaruh Terhadap Pemikiran Generasi Muda Indonesia**

Rika Cahyani  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang  
e-mail: [cahyanirika860@gmail.com](mailto:cahyanirika860@gmail.com)

**Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kurikulum Sejarah 1984 dan pengaruhnya terhadap pemikiran generasi muda Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari 4 tahapan yaitu *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Sumber penelitian berupa buku, jurnal, dan penelitian relevan yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi ajar dalam pembelajaran sejarah era Orde Baru yang termuat dalam Kurikulum 1984 mengkaitkan antara pendidikan dan politik menjadi satu kesatuan yang erat. Melalui kurikulum tersebut, pemerintah berupaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengubah kurikulum melalui penciptaan konten baru dan memasukkannya dalam pembelajaran sejarah. Konten tersebut kemudian disebut sebagai PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). PSPB menjadi alat legitimasi kekuasaan Pemerintah Orde Baru yang disisipkan melalui pendidikan. Upaya tersebut terlihat dari konteks materi di setiap jenjang pendidikan dari SMP hingga SMPA yang membahas tentang “militer dan Pancasila” guna mendukung kekuasaan pemerintah. Militer digunakan untuk mengetahui peran pemerintahan dalam kemerdekaan dan Pancasila digunakan sebagai tameng perlindungan dibalik hegemoni Pemerintah Orde Baru. Kondisi tersebut berakibat pada pemikiran generas muda yang hanya berfokus pada konteks Orde Baru dan tidak dibekali pengetahuan tentang era sebelumnya.

**Kata kunci:** *PSPB, Kurikulum 1984, Pendidikan Sejarah, Politik, Generasi muda*

**PSPB: THE 1984 HISTORY CURRICULUM AND ITS INFLUENCE ON THE THINKING OF INDONESIA'S YOUNG GENERATION**

Rika Cahyani  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang  
e-mail: [cahyanirika860@gmail.com](mailto:cahyanirika860@gmail.com)

**Abstract-** This research aims to examine the 1984 History Curriculum and its influence on the thinking of Indonesia's younger generation. The method used in this research is the historical method which consists of 4 stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and writing. The research sources are books, journals, and other relevant research. The results showed that the teaching materials in the New Order era history learning contained in the 1984 Curriculum linked education and politics into a close unity. Through the curriculum, the government sought to maintain power by changing the curriculum through the creation of new content and including it in history learning. The content was later referred to as PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). PSPB became a tool to legitimize the New Order government's power through education. This effort can be seen from the context of the material at every level of education from junior high school to high school which discusses “the military and Pancasila” to support the government's power. The military was used to recognize the government's role in independence and Pancasila was used as a shield of protection behind the hegemony of the New Order Government. This condition results in the thinking of young generations who only focus on the context of the New Order and are not equipped with knowledge about the previous era..

**Keywords:** *PSPB, Curriculum 1984, History Education, Political, Young Generation*

## **Pendahuluan**

Akhir-akhir ini generasi muda Indonesia sedang dihadapkan masalah pada penurunan kesadaran sejarah bangsanya sendiri. Generasi muda kurang memiliki pemahaman yang semestinya terhadap pembelajaran sejarah di sekolahannya. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran sejarah yang kurang optimal. Generasi muda (khususnya SMA) difokuskan pada materi sejarah yang seolah-olah hanya menghafal tahun dan nama tokoh saja. Menghafal seperti itu sangat menyulitkan generasi muda. Rasa nasionalisme generasi muda perlahan akan hilang di tengah kehidupan. Padahal Nasionalisme sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Dengan itu perlunya sebuah pendidikan sejarah yang optimal untuk kembali menumbuhkan kembangkan nasionalisme lewat pendidikan. Pada dasarnya pendidikan lah yang merupakan wahana penting kehidupan manusia. Tanpa pendidikan manusia tidak akan mengerti dan memahami betul sejarah akan bangsanya sendiri.

Sejarah pendidikan merupakan kebutuhan yang penting di dalam kehidupan manusia. Terealisasinya sebuah pendidikan tidak dapat dilepaskan dari adanya kurikulum. Dengan itu kurikulum menjadi faktor utama yang diperhatikan pemerintah dalam perkembangan zaman. Kurikulum memiliki kedudukan yang tidak tetap. Artinya pemerintah selalu mengganti kurikulum sesuai dengan masa kebijakannya. Salah satu kurikulum yang selalu mengalami perubahan dapat kita lihat pada mata pelajaran sejarah. Pada mata pelajaran sejarah kurikulum disesuaikan untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Hal ini dapat dilihat pada masa Orde Baru dimana kurikulum mata pelajaran sejarah mengalami perubahan selama 4 kali di dalam kebijakan pemerintah. Kurikulum tersebut meliputi: kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994 (Safei & Hudaidah, 2020a). Semua kurikulum yang diubah tersebut ditetapkan dalam rangka membentuk generasi muda yang siap menghadapi segala tugas dimasa yang akan datang.

Salah satu kurikulum pada masa Orde Baru masih menjadi perdebatan serius pada ranah pendidikan. Kurikulum ini dapat dilihat pada kurikulum 1984 yang secara garis besar memainkan peran sentral di dalamnya. Hal ini sangat berhubungan dengan pemerintah yang berkuasa saat itu, dimana didalamnya hanya memuat beberapa materi yang berkonteks sama dan berulang pada setiap jenjang pendidikan. Materi inilah yang menyinggung lebih banyak peran pemerintah yang berkuasa demi keuntungannya sendiri. Materi-materi tersebut dapat ditemukan dalam buku teks kurikulum 1984 yaitu pada materi PSPB dalam mata pelajaran sejarah (Swarinoto & Umasih, n.d.). Rupanya pemerintah Orde Baru memiliki pencitraan yang sangat tajam, mereka menyadari bahwa sejarah merupakan pendidikan yang paling tepat untuk dimainkan. Pasalnya sejarah merupakan pendidikan yang mampu membentuk watak, karakter, jiwa nasionalis dan kebangsaan generasi muda (Hartono, 2017). Dengan itu akhirnya pemerintah mengganti kurikulum menjadi kurikulum 1984 tersebut dan memasukkan materi baru PSPB yang menyinggung mengenai nilai-nilai perjuangan kebangsaan Indonesia. Pada awalnya materi dalam kurikulum 1984 hanya menggunakan materi inti Sejarah Nasional Indonesia, akan tetapi disini pemerintah menambahkan konten materi baru dengan konsep kebangsaan dengan nilai Pancasila, yaitu PSPB (Naredi, 2019). Materi baru PSPB inilah yang secara terang-terangan melakukan hegemoni politik besar demi kepentingan pemerintah yang berkuasa saat itu (Safitri, 2016).

Pada masa Orde Baru dapat diartikan bahwasanya antara pendidikan dan politik sangat kental akan nuansanya. Politik dilakukan secara nyata dan tertutup didalamnya. Kepentingan pemerintah yang pribadi dilakukan secara nasional melalui buku teks sejarah sekolah, sehingga sangat mempengaruhi pemikiran seluruh peserta didik saat itu (Purwanta, 2013). Sejarah yang seharusnya memegang peran strategis untuk membentuk identitas, moralitas, dan watak generasi muda, justru dijadikan sebagai ajang propaganda dan instrumen politik belaka. Kurikulum pun menjadi hal yang tidak sesuai dengan bagaimana fungsi yang semestinya. Kurikulum yang seharusnya bisa membantu mengatasi segala permasalahan peserta didik di dalam pembelajaran, malah digunakan sebagai ajang penyelubungan dan pengilegalan kekuasaan pemerintah Orde Baru (Syafutra, 2016). Ibaratnya kurikulum 1984 merupakan angin segar yang memperlancar gerak pemerintah saat itu. Materi yang berhubungan dengan kekuasaannya disinggung rinci didalamnya.

Sedangkan materi yang tidak terlalu penting atau tidak ada sangkut paut dengan kekuasaannya dibuang dan diabaikan dalam konteks pembelajaran sejarah (Safitri & Purwaningsih, 2016). Hal ini dilakukan supaya generasi muda hanya dapat melihat ideologi dan pandangan fokus kepada pemerintahannya. Pemerintah seakan terlihat sangat superior dan unggul dalam kemerdekaan Indonesia. Sehingga generasi muda dapat lebih patuh dan tunduk kepada mereka yang berkuasa didalamnya. Kondisi-kondisi seperti itulah yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan membuat materi yang mengagung-agungkan dirinya akan melanggengkan kekuasaan dan kedudukan di dalamnya.

Dari kondisi tersebutlah yang memberikan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai masuknya materi PSPB dalam kurikulum 1984 serta pengaruhnya terhadap pemikiran generasi muda Indonesia saat itu. Selain itu supaya hal ini mendapatkan perhatian lebih mengenai pandangan-pandangan politik yang terselubung dibalik pendidikan Orde Baru demi kepentingan kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Pemerintah berusaha menyamakan maupun menyejajarkan pemikiran generasi muda untuk lebih melihat bahwa pemerintah Orde Baru adalah pemerintah yang baik dan sangat unggul. Pemerintah yang paling berjasa dalam negeri Indonesia. Pemerintah yang paling handal dibanding pemerintah sebelumnya. Generasi muda akan dibuat kagum dan tunduk pada kekuasaannya. Sehingga inilah yang disebut mengaburkan pandangan generasi muda tentang Indonesia sendiri. Disini akan diungkap lebih dalam mengenai politik tersembunyi namun terlihat secara terang-terangan memainkan peran sentral dibalik pendidikan sejarah Indonesia. Berdasarkan pada kondisi tersebut muncul berbagai permasalahan peneliti, yaitu bagaimana masuknya PSPB sebagai praktik ideologi pemerintah orde baru? Apakah benar PSPB merupakan praktik kurikulum tersembunyi? dan Bagaimana Pengaruh PSPB terhadap pemikiran generasi muda Indonesia?

## **Metode Penelitian**

### *Pendekatan:*

Penelitian mengenai “Masuknya PSPB Dalam Kurikulum Sejarah 1984 dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Generasi Muda Indonesia” menggunakan pendekatan sejarah Historiografi melalui 4 tahapan, yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan penulisan. Dalam hal ini penulis memanfaatkan teknik studi pustaka melalui buku maupun jurnal-jurnal yang relevan. Langkah awal yang dilakukan penulis yaitu tahap Heuristik atau pencarian sumber, disini penulis mencari sumber-sumber yang relevan melalui buku dan jurnal ilmiah. Tahap kedua yaitu Kritik Sumber, disini penulis melakukan pengujian atau pemilihan sumber-sumber yang relevan dan setema terkait konten PSPB dalam kurikulum 1984 pada masa Orde Baru. Sehingga disini penulis akan mendapatkan fakta-fakta penelitian terkait konten PSPB dalam kurikulum 1984 pada masa Orde Baru. Tahap ketiga yaitu Interpretasi atau penafsiran, setelah penulis mendapatkan temuan fakta-fakta, penulis melakukan analisis dan menginterpretasi sumber untuk diolah dan dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Pada tahap penafsiran ini dilakukan untuk melihat kurikulum 1984 Orde Baru dengan hegemoni politik saat itu. Sehingga hal ini dapat membuktikan kepentingan politik penguasa dibalik konten materi PSPB dalam mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia. Langkah terakhir yaitu Penulisan, disini penulis menyajikan hasil pengolahan data menjadi sebuah artikel ilmiah yang berjudul “Masuknya PSPB Dalam Kurikulum Sejarah 1984 dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Generasi Muda Indonesia”. Topik inilah yang sangat membutuhkan perhatian supaya tidak ada lagi oknum pemerintah yang melakukan keuntungan kekuasaannya dibalik pendidikan terutama dalam mata pelajaran sejarah. Supaya seseorang menyadari betapa berharganya bahwa sebuah pendidikan itu dilakukan sepenuhnya untuk mencerdaskan generasi muda yang siap menghadapi segala tantangan yang ada. Dengan itu artikel ini akan disajikan penulis secara urut dan sistematis guna memudahkan pemahaman para pembaca. Penulis disini juga menggunakan metodologi sejarah dengan ilmu bantu politik setelah mengkaji beberapa fakta-fakta yang ditemukan. Sehingga artikel ini akan memberikan pengetahuan seseorang dengan nyata terhadap pendidikan pada masa Orde Baru khususnya PSPB dalam Kurikulum 1984.

#### *Sumber Data:*

Dalam penelitian ini penulis sepenuhnya menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang informasi sepenuhnya diperoleh secara tidak langsung atau melalui media lain. Disini penulis memperoleh data berasal dari jurnal-jurnal Ilmiah dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Jurnal ilmiah yang dominan menjadi pegangan penulis yaitu jurnal *Avatara* dalam pendidikan sejarah kurikulum Orde Baru yang ditulis oleh Ria Safitri & Purwaningsih. Hal ini memungkinkan penulis memperoleh data yang sangat gamblang terkait pendidikan pada masa Orde Baru. Selain pada jurnal tersebut penulis juga menggunakan jurnal-jurnal dan buku-buku yang lain untuk dijadikan sebagai bahan pendukung penulis dalam menguak fakta dibalik pendidikan Orde Baru. Dengan ini penulis menemukan data- data yang spesifik dengan penelitian yang dilakukan.

#### *Teknik Pengumpulan Data :*

Dari penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi pustaka. Studi pustaka disini merupakan teknik untuk mencari informasi atau data melalui literatur-literatur penunjang dengan cara menelaah dan menganalisis informasi yang ada pada literatur-literatur yang digunakan. Literatur yang didapat merupakan literatur yang benar-benar ilmiah dan relevan terkait dengan topik penelitian. Penulis menggunakan literatur dari buku dan jurnal yang sudah terakreditasi. Dengan itu data yang didapat penulis merupakan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan teknik analisis yang mendalam dan menyeluruh akan memberikan pengetahuan penulis dengan sangat jelas terkait informasi pendidikan pada masa Orde Baru. Sehingga data yang diperoleh ini merupakan data yang asli yang memuat fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga tidak ada unsur manipulasi data apapun didalamnya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Awal Masuk Konten Materi PSPB (Kurikulum 1984) dan Penyelubungan hegemoni politik Dalam Mata Pelajaran Sejarah**

Awal masuknya kurikulum 1984 sangat berhubungan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (menteri P dan K) saat itu, yaitu Nugroho Notosusanto. Menteri P dan K Nugroho Notosusanto merupakan seorang sastrawan sejarah sekaligus menjabat sebagai kepala sejarah ABRI sejak tahun 1964. Kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari dunia kemiliteran. Dengan itu pada saat Nugroho menjabat sebagai menteri P dan K 1983, kurikulum pelajaran sejarah yang sebelumnya memakai kurikulum 1975 diubah menjadi kurikulum 1984 dan memasukkan konten materi baru dalam pendidikan sejarah, yaitu PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), dimana konten materi ini lebih mengagung-agungkan peran ABRI di dalamnya (Suparjan, 2020). Lahirnya PSPB dalam kurikulum 1984 dilatarbelakangi oleh utusan pemerintah Soeharto yang sedang memerintah saat itu. Alasan dibentuknya kurikulum ini dengan tujuan untuk menyempurnakan kurikulum 1975 yang dirasa masih rendah terhadap penanaman semangat kebangsaan dan sikap mempertahankan kemerdekaan. Dengan itu Nugroho Notosusanto mengakomodasi keinginan Soeharto ini di dalam kurikulum 1984 dan menetapkan konten materi PSPB ke dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) (Syafutra, 2016).

Lahirnya PSPB dalam kurikulum 1984 sangat terlihat jelas bahwa ada hubungan erat antara Nugroho Notosusanto dengan Pemerintah Soeharto. Kedekatan antara mereka berdua ternyata sudah sangat lama sehingga untuk menerbitkan buku dalam kurikulum baru pun sangat mudah untuk dilakukan. Kedekatan mereka dapat dilihat pada saat Nugroho Notosusanto sebelum menjabat sebagai Menteri P dan K Nugroho pernah melakukan penyusunan buku yang berjudul *Sejarah Indonesia* dengan jumlah 6 jilid. Disini Nugroho Notosusanto berhasil menerbitkan buku *Sejarah Indonesia* itu dengan mudah. Nugroho tidak pernah meminta izin kepada penulis untuk melakukan revisi beberapa kali. Tanpa meminta izin penulis sebelumnya, akan tetapi dengan restu pemerintah Soeharto

Nugroho Notosusanto berhasil menerbitkan buku Sejarah Indonesia dengan sangat lancar (Sardiman & Yuliantri, 2012). Hal ini membuktikan bahwa kedekatan antara mereka sudah terjalin sejak lama, bahkan Nugroho Notosusanto dapat diartikan sebagai kaki tangan pemerintah Soeharto pada masa Orde Baru.

Masuknya materi PSPB dalam kurikulum 1984 tergolong sangat tergesa-gesa, buku pengajarannya pun belum dibentuk secara selesai, dan guru dengan jam yang kurang dalam pembelajaran, diberikan kebebasan untuk mengajar materi tersebut. Hal ini lah yang pernah membingungkan beberapa orang yang tidak menyetujuinya dan sempat menyebut PSPB ini sebagai Pembelajaran Supaya Peserta Bingung. Namun hal ini tetap membuat PSPB tetap masuk dalam kurikulum 1984 oleh Menteri Nugroho Notosusanto (Sardiman & Yuliantri, 2012). Saat PSPB berhasil diterapkan dalam kurikulum 1984 mata pelajaran sejarah, materi yang diambil difokuskan pada bagian-bagian tertentu saja. Tema yang diambil seputar penekanan pada militer (perjuangan fisik) dan kekuasaan pemerintah Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dalam GBPP PSPB satuan SMA kelas 3 sebagai tujuan intruksionalnya 3.8 siswa dibuat yakin bahwa Orde Baru memiliki keberanian untuk membela keadilan dan kebenaran (Budiono & Awaludin, 2017). Dalam tujuan intruksional 3.8 tersebut juga dinyatakan bahwa orde baru berhasil memulihkan keadaan ketertiban Indonesia setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI. Selanjutnya pada tujuan intruksional 4.1 siswa juga diharapkan untuk yakin terhadap kekuasaan Orde Baru yang telah berani membela kemerdekaan dan keadilan melawan PKI. Disini seolah-olah pemerintah Orde Baru mengklaim bahwa PKI yang telah menjadi dalang peristiwa itu, sehingga siswa dibuat yakin bahwa pemerintah Orde Baru sangat berjasa didalamnya. Pada tujuan intruksional 4.2 juga dijelaskan siswa dituntut untuk yakin terhadap pemerintah Orde Baru bahwa Orde Baru mengedepankan kepentingan negara dan rakyat Indonesia (Batubara, 2019). Kemudian pada tujuan kurikuler 5 menyatakan bahwa Orde Baru telah melaksanakan tekad Pancasila dan UUD 1945 dengan sangat murni dan konsekuen. Disini siswa akan memiliki pandangan bahwa Orde Baru memang benar-benar menjalankan ideologi negara dan konstitusional dengan penuh kemurnian. Selanjutnya dapat dilihat pada tujuan intruksional 5.3 sampai 5.6 semua keseluruhan materinya membahas mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan stabilisasi keamanan.

Menariknya lagi pada materi ini juga terdapat unsur kesamaan antar jenjang pendidikan yang berbeda. PSPB pada satuan SMP kelas 3 hampir sama dengan materi satuan SMA kelas 3. Disini sangat menafsirkan bahwa pemerintah Orde Baru sedang mempromosikan dirinya melalui generasi muda (siswa). Hal ini dapat dilihat dalam GBPP IPS SMP kelas 3 pada tujuan kurikuler 4 bahwa Orde Baru telah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan penuh konsekuen dan membahas bahwa Orde Baru telah berani membela keadilan dan kebenaran. Kemudian disini dapat dilihat pada tujuan intruksional 4.1 sampai 4.8 juga membahas secara keseluruhan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan nasional. Semua materi yang diajarkan 70% memiliki kesamaan dengan materi PSPB SMA. Peran Orde Baru sangat terlihat jelas mendominasi lewat jalur pendidikan. Hal ini sudah menjadi barang tentu bahwasanya pemerintah Orde Baru adalah pemerintah yang berkuasa saat itu (Safitri, 2016).

Setelah membahas dari GBPP PSPB SMA dan SMP kelas 3 materi PSPB pada jenjang SMA dan SMP kelas 2 wajib mendapatkan perhatian juga. Disini terdapat materi yang ada unsur “fitnah” dibalik PSPB yaitu pada materi G30S/PKI. Dapat kita lihat pada GBPP PSPB SMA kelas 2 pada tujuan intruksional 3.1 yang menjelaskan bahwa PKI merupakan pemberontak dengan memaksakan kehendak secara pribadi atau sepihak untuk menghancurkan NKRI. Dalam bahan ajarnya 3.1.6 juga dinyatakan bahwa PKI telah menuntut kaum buruh untuk dipersenjatai. Kemudian pada 3.1.7 muncul fitnah (isu) Jenderal dalam gerakan ini. 3.1.8 mengenai gerakan Nasakom. 3.1.9 mengenai penyakit Soekarno dan persiapannya dalam melakukan kudeta PKI. 3.1.10 kampanye oleh PKI dalam mengusir lawan politik. Terakhir pada 3.1.11 gerakan G30S/PKI secara keseluruhan.

Selanjutnya pada GBPP PSPB SMP kelas 2 juga memiliki kesamaan dengan SMA kelas 2. Disini dapat dilihat pada tujuan intruksional 3.6 juga membahas mengenai PKI

yang memaksakan kehendak sepihak. Bahan ajar didalamnya pun juga sama mulai dari 3.6.1 sampai 3.6.8 membahas penuh mengenai PKI dalam pemberontakannya, fitnah Jenderal, sampai pada penumpasan penuh peristiwa G30S/PKI. Jika kita lihat secara mendalam hampir secara keseluruhan materi PSPB SMA dan SMP kelas 2 membahas tema yang sama yaitu mengenai G30S/PKI. Disini pemerintah menetapkan bahwa PKI seolah menjadi pemicu adanya pemberontakan 1965 ini. Siswa dituntut untuk percaya bahwa PKI adalah pemberontak peristiwa 1965, dan siswa dituntut untuk setuju bahwa tindakan yang dilakukan PKI terhadap bangsa Indonesia sangat menyimpang dan menyeleweng dengan konsep Pancasila. Jika siswa menyetujui hal tersebut maka siswa tersebut akan dianggap telah sesuai dengan ideologi Pancasila sebagaimana kesesuaian Orde Baru terhadap Pancasila. Selain menganggap PKI dalang dibalik peristiwa 1965, mulai memunculkan isu Jenderal dibalik peristiwa ini, sehingga peristiwa ini sangat menyulitkan pemahaman peserta didik didalamnya. Padahal jika dilihat secara analisis pemerintah Orde Baru sangat mengetahui betul adanya peristiwa 1965 ini. Nampaknya pemerintah Orde Baru sangat berkepentingan untuk melakukan pencegahan peristiwa ini. Siswa dibuat yakin bahwasanya Orde Barulah yang telah memiliki jasa dalam menumpas gerakan G30S ini.

Setelah membahas mengenai materi G30S/PKI dalam PSPB kita alihkan pada fokus materi yang kedua yaitu mengenai Kemiliteran (Rahmawati, 2022). Dalam tema ini sangat berhubungan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto saat itu. Nugroho pernah menjadi seorang Tentara Militer masa Jepang (PETA) dan ia juga merupakan Kepala ABRI saat itu. Nugroho Notosusanto juga merupakan orang yang berjasa dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena ia ikut serta dalam perang kemerdekaan saat itu. Pada akhirnya pada tahun 1972 Nugroho Notosusanto membentuk sebuah seminar yang diikuti oleh generasi muda dengan konteks bahasan mengenai pewarisan nilai-nilai kemerdekaan 1945. Dari hal inilah akhirnya Nugroho memunculkan PSPB dengan maksud dan tujuan yang dijelaskan didalamnya untuk pewarisan nilai-nilai 1945. Disinilah yang akhirnya PSPB banyak pembahasan mulai Kemiliteran pada masa Nugroho Notosusanto, yang dapat dibuktikan melalui GBPP PSPB SMA mulai kelas 1 sampai kelas 3. Dalam bahan ajar SMA kelas 1 mulai dari 2.1.6 sampai 2.1.10 disinggung lengkap mengenai sejarah militer mulai awal perkembangannya sampai pembentukan polisi negara. Kemudian pada kelas 2 SMA tujuan intruksional 3.1.1 mengenai KNIL, APRIS, dan KMB dalam sebuah militer. Tujuan intruksional 3.1.2 tentang peran militer dalam menumpas G30S/PKI. Terakhir pada jenjang kelas 3 SMA, tujuan intruksional 3.8.1 mengenai peran militer dalam pemulihan keamanan setelah peristiwa G30S/PKI. Pada tujuan intruksional 4.2.1 mengenai Supersemar yang merupakan bagian dari kemiliteran. Terakhir, pada tujuan intruksional 4.2.5 mengenai pernyataan oleh ABRI. Jika dilihat dengan cermat dapat terlihat bahwa materi PSPB ini sangat digunakan pemerintah yang berkuasa untuk kepentingannya. Disini peran militer yang berhubungan dengan Menteri P dan K Nugroho Notosusanto sangat diagung-agungkan, sangat dibahas secara gamblang dalam materi ini. Semangat mempertahankan nilai-nilai 1945 dijadikan sebagai motif penyelubangan semata untuk mempertahankan kedudukannya dalam memerintah saat itu.

Jika diamati dari materi-materi diatas mulai dari SMP dan SMA sangat terlihat jelas bahwa pemerintah Orde Baru sangat mendominasi. Penyelubangan politik dalam pembelajaran sejarah PSPB sangat terlihat jelas pada konteks pengulangan materi yang sama. Peran pemerintah Orde Baru sangat diunggulkan terutama dalam kebijakan dan kemiliteran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan perhatian seseorang dan generasi penerus percaya bahwa ialah merupakan satu-satunya pemerintah yang sangat baik dalam memerintah. Hingga penyelubangan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terutama pada generasi muda penerus bangsa Indonesia.

## B. Pengaruh Materi PSPB Terhadap Pemikiran Generasi Muda Indonesia

Kurikulum 1984 oleh Nugroho Notosusanto (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) awalnya memang memiliki beberapa tujuan yang meyakinkan masyarakat saat itu. Beberapa tujuan yang diterapkan diantaranya adalah membentuk generasi yang Pancasilais dan berdasar pembangunan, membentuk generasi yang memiliki kepribadian dan identitas nasional, membentuk watak dan karakter generasi muda, menumbuhkan jiwa nasionalisme bangsa, menjunjung tinggi bangsa Indonesia, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab dan cinta terhadap bangsa sendiri (Syafutra, 2016). Akan tetapi pada kenyataannya setelah materi ini ditetapkan, secara terang-terangan materi tersebut terselubung praktik kekuasaan pemerintah orde baru yang melakukan pengilegalan kekuasaan di dalamnya (Safitri, 2016). Kondisi ini tidak sesuai dengan tujuan yang diterapkan, dimana yang utamanya ingin membentuk watak, identitas dan bangsa yang Pancasilais, justru bersemayam praktik politisasi, ideologi, dan kepentingan pemerintah Orde Baru yang semakin mendominasi (Alam, 2020; Fareza, 2016). Hal inilah yang akhirnya mengaburkan pandangan generasi muda terhadap sejarah bangsanya sendiri, karena materi yang ada tidak diceritakan secara obyektif akan tetapi lebih mengedepankan unsur subyektivitas dari si penulis sendiri.

Penulis Nugroho Notosusanto menganggap pendidikan menjadi hal yang krusial untuk kepentingan kebangsaan Indonesia. Sebagaimana hakikat pendidikan yang ditekankan berbunyi sebagai berikut:

“Jika seseorang diberi ikan, maka orang tersebut akan memakan ikan setiap hari; Jika seseorang kau ajarkan cara menangkap ikan, maka ia akan memakan ikan seumur hidupnya! (Artinya) Pendidikan bukan hanya bersifat memberi ikan belaka, akan tetapi, juga harus mengajarkan bagaimana cara menangkap ikan” (Sardiman & Yuliantri, 2012)

Jika melihat pada hakikat pendidikan menurut Nugroho Notosusanto tersebut sebenarnya kebijakan yang dilakukan sudah baik. Disini dapat diartikan bahwasanya dalam menyusun sebuah kurikulum tidak boleh hanya dijejali ikan, akan tetapi cara menangkap ikan. Dengan itu kurikulum harus disesuaikan dengan standar sesuai kebutuhan dari peserta didik. Sebenarnya pemikiran Menteri P dan K Nugroho Notosusanto sangat istimewa akan tetapi pengimplementasiannya dalam mengubah kurikulum tidak dilakukan atas dasar apa yang telah ditentukan. Kurikulum bukan dilakukan dengan berdasar kebutuhan para siswa, akan tetapi untuk kebutuhan penguasa, yang secara garis besar dapat dilihat pada materi PSPB yang seluruh isinya hanya mengarah kepada dominasi pemerintah Orde Baru semata (Sardiman & Yuliantri, 2012).

### 1. Pancasila Sebagai Tameng Hegemoni Politik Untuk Membentuk Kepatuhan Siswa

Pancasila merupakan ideologi yang harus dipegang teguh oleh seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus berupaya tunduk dan selalu patuh pada konsep Pancasila. Hal ini yang dijadikan kesempatan pada masa Orde Baru untuk memainkan peran penting politiknya melalui Pancasila. Masa Orde Baru pemerintah dengan sengaja berlindung dibalik Pancasila untuk mempengaruhi pemikiran generasi muda didalamnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjabaran sebagai berikut:

*Pertama*, sebagaimana yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya dalam GBPP PSPB SMA pada tujuan kurikuler 5 bahwa masa Orde Baru melaksanakan kebijakan sesuai Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian pada GBPP PSPB SMP pada tujuan kurikuler 4 juga disebutkan bahwa peserta didik meyakini Orde Baru dalam membela kebenaran dan melaksanakan Pancasila sesuai kemurnian dan konsekuen (Priarni, Yaqin, & Imron, 2022; Safei & Hudaidah, 2020b). *Kedua*, pada tujuan intruksional 5.2 SMA juga dijelaskan bahwa siswa harus patuh pada konsep Pancasila, serta tidak boleh menyimpang darinya. Kita dapat tarik sebelum PSPB masuk, masyarakat dibentuk sebagai manusia pembangunan ber-Pancasila, akan tetapi setelah PSPB masuk mulai lah diperbarui sebagai pendidikan berlandaskan Pancasila. Kata berlandaskan tersebut seolah-olah

harus disesuaikan dan patuh terhadap Pancasila, apabila peserta didik yang menyimpang dianggap tidak memenuhi aturan kebijakan Orde Baru yang telah ditetapkan. Kondisi seperti ini akhirnya dipatuhi dan diyakini oleh peserta didik dengan sangat baik dan sejalan dengan aturan pemerintah Orde Baru. Selain itu siswa juga dituntut berpegang teguh dan mengamalkan Pancasila agar mengembangkan perbuatan yang berbudi luhur dan mencerminkan sifat kekeluargaan. Tujuan intruksional 5.2 yang dimaksud tersebut yaitu P4 yang merupakan Pedoman untuk mengamalkan Pancasila. Kemudian pada tujuan intruksional 5.5 SMA juga dijelaskan bahwa siswa dituntut menyadari musyawarah Nasional untuk membentuk rasa hormat menghormati antar semua agama di Indonesia. Ketiga, pada tujuan intruksional SMA 5.6 dijelaskan bahwa siswa harus yakin terhadap pembangunan nasional untuk membentuk kemakmuran yang berkeadilan sosial. Dalam bahan ajarnya 5.6.1 menyebutkan materi mengenai Pelita I-IV. Dari tujuan intruksional tersebut sangat jelas bahwa siswa dibuat yakin terhadap pembangunan yang dilakukan orde baru yang menyangkut Pelita I-IV merupakan bagian dari ideologi Pancasila.

Dari hal di atas sangat membuktikan bahwa Pancasila dijadikan tameng atau tempat perlindungan pemerintah Orde Baru untuk membentuk rasa patuh peserta didik terhadap kekuasaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam artikel kurikulum Orde Baru yang ditulis oleh Ria Safitri yang menyebutkan serupa bahwa “pemerintah Orde Baru memainkan Pancasila sebagai alat perlindungan untuk setiap kebijakannya. Apabila ada yang melanggar akan dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila”. Kondisi seperti itu yang memberikan makna bahwa siswa dituntut untuk mempercayai seluruh kekuasaan Orde Baru dengan alasan Pancasila. Dengan itu siswa akan tergugah hatinya karena pada dasarnya ada embel-embel ideologi “Pancasila” yang harus dan wajib untuk dipatuhi.

## 2. **G30S/PKI (Membentuk Kepercayaan Siswa)**

Sebelum meletusnya gerakan G30S Indonesia sedang dihadapkan kondisi politik yang memanas terutama terhadap Soeharto dan Soekarno. Demokrasi terpimpin dengan Nasakomnya memberikan jalan bagi PKI ikut berperan dalam pemerintahan, yang menyebabkan menuai konflik didalamnya. Hal inilah yang membuat militer saat itu benci terhadap anggota PKI. Sehingga saat itu juga PKI dan Soekarno menjadi musuh terbesar anggota militer yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kondisi ini sudah barang tentu jika PKI yang dihabisi karena ada musuh bebuyutan yang terjadi sebelumnya (Kurniawan, 2014).

Selanjutnya, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan dalam GBPP PSPB SMA dan SMP bahwasanya pada materi G30S pasti arahnya pada PKI. Secara umum PKI dianggap sebagai dalang dibalik kudeta 1965 ini. Anehnya lagi disini dijelaskan bahwa penumpasan peristiwa 1965 ini berhasil dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah diartikan sebagai penyelamat kudeta 1965. Hal ini sangat memiliki tujuan untuk mempengaruhi pemikiran peserta didik didalamnya, bahwa pemerintah Orde Baru yang telah berjasa demi Indonesia menghadapi kudeta 1965.

Selain itu disini peserta didik sangat diakrabkan dengan perkataan “pemberontakan”, “paksaan kehendak”, “G30S/PKI”, “penyelewengan UUD 1945”, Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen. Dari hal tersebut akan menggiring kata “pemberontakan” pasti dilakukan oleh PKI, DI/TII, APRA, RMS. Jika pada kata “penyelewengan UUD” pasti akan mengarah pada demokrasi terpimpin dalam Nasakomnya. Kemudian jika pada “paksaan kehendak” akan mengarahkan pada PKI. Jika berbicara pada “Pancasila dan UUD 1945” yang dilakukan secara murni dan juga konsekuen pastinya akan mengarah kepada pemerintah Orde Baru yang lebih baik dari sebelumnya. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa pemerintah Orde Baru sengaja membentuk pola pikir generasi



muda untuk percaya bahwa pemerintah Orde Baru lah yang lebih unggul dari segalanya. Peserta didik akan dibuat benci pada kelompok yang ditunjuk dengan kata-kata yang beraliran negatif tersebut (pemberontakan, penyelewengan, pemaksaan kehendak). Tanpa disadari bahwasanya kata tersebut secara keseluruhan merupakan hegemoni pemerintah untuk dijadikan keuntungan Orde Baru sendiri. Kondisi seperti ini jelas membentuk pola pikir generasi muda supaya percaya dan loyal terhadap pemerintah Orde Baru (SAFITRI, 2016, p.652). Orde baru ditunjukkan secara sempurna dan harus didukung, sedangkan dari PKI dihabisi secara mutlak dan nyata. Hal tersebut sangat jelas bahwa sejarah digunakan sebagai doktrinasi siswa untuk mendukung hegemoni politik kekuasaan pemerintah Orde Baru (Sulthon, 2014).

### **3. Militer (Membentuk Penerimaan Siswa Terhadap Militer Dalam Penyelenggaraan Negara)**

Materi militer tentu memiliki kedudukan yang sama seperti materi PSPB yang lainnya. Materi ini sangat berhubungan dengan Nugroho Notosusanto yang telah menetapkan kurikulum 1984 dan memasukkan konten materi PSPB. Hal ini sudah menjadi barang tentu bahwasanya di dalam materi tersebut sangat menonjolkan dirinya sendiri. Sebagaimana sudah penulis jabarkan dalam GBPP PSPB SMA kelas 1 mulai dari bahan ajar 2.1.6 sampai 2.1.10 semua membahas lengkap mengenai peran militer sampai terakhir pembentukan kepolisian negara. Kemudian pada kelas 3 SMA juga menjelaskan mengenai tema yang sama, yaitu militer diunggulkan terhadap pemulihan keamanan dan ketertiban kondisi Indonesia pasca peristiwa G30S. Disini juga muncul pertanyaan mengapa dalam materi PSPB mengisahkan awal kemerdekaan sampai pemerintah Orde Baru? Apa hal ini merupakan internal yang berasal dari kisah Nugroho Notosusanto sendiri sehingga ia menulis buku ini juga demi keuntungannya sendiri. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembahasan mengenai PETA dan kemerdekaan sebagai lahir dan semangatnya bangsa Indonesia sangat menjadi hal yang mengandung doktrinasi. Secara, Nugroho Notosusanto pernah mengikuti militer bentukan Jepang (PETA) sebelum kemerdekaan. Sedangkan pembahasan pada kemerdekaan sebagai semangat dan lahirnya bangsa Indonesia dilatarbelakangi oleh Nugroho Notosusanto yang mengikuti perjuangan fisik untuk memperjuangkan Indonesia sampai pada tahap kemerdekaan. Segi ini dibahas secara jelas dan rinci, mulai tahap awal perkembangan sampai pada pembentukan anggota kepolisian. Dengan itu sangat jelas bahwa kisah yang berhubungan dengan dirinya dan Orde Baru selalu ditonjolkan nyata dalam konten materi PSPB.

Konten militer tersebut sangat membentuk pola pikir generasi muda mengenai kehebatan militer dalam memperjuangkan kemerdekaan. Militer dimanfaatkan pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan rezim kekuasaannya. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan secara ketat melalui jalur pendidikan. Selain itu Orde Baru juga mengekang setiap pendapat dari masyarakat. Dengan ini militer dimainkan dibalik layar untuk melancarkan misinya dalam birokrasi jabatan. Birokrasi yang dijabat meliputi Golkar, Kepala Daerah, hingga Menteri. Semua hal ini dilakukan supaya meyakinkan pikiran generasi muda bahwa militer adalah satu keutuhan yang baik dalam penyelenggaraan negara. Dengan itu generasi muda (siswa) akan mendukung setiap keputusan yang diambil pemerintah. Sebagaimana saat itu Golkar selalu menang beberapa kali pada saat pemilihan, karena disini pemerintah cerdas memainkan militer sebagai alat doktrinasi untuk kebutuhan rezim penguasa sendiri (Kurniawan, n.d, 2014). Sebagaimana hal ini diartikan bahwa militer telah membentuk ingatan kolektif peserta didik agar selalu ingat dan memahami betul terhadap sosok Nugroho Notosusanto dalam memperjuangkan kemerdekaan (Kusuma, n.d. 2020).

#### 4. Penenggelaman Peran Soekarno

Pada materi PSPB terkait dengan pembahasan 1945 yang disoroti hanya seputar militer menteri Nugroho Notosusanto. Perjuangan fisik lebih ditonjolkan, dan peran Soekarno sebagai sosok pemimpin sebelumnya tidak disinggung positif di dalamnya. Nugroho menjelaskan alasan Soekarno tidak ditonjolkan di dalamnya karena Soekarno bukan anggota dari kemiliteran. Soekarno tidak berperan dalam perjuangan fisik. Sehingga Nugroho Notosusanto hanya menyoroti pembahasan 1945 hanya seputar dengan perjuangan fisik. Disini juga terdapat upaya penenggelaman Soekarno dalam materi tersebut, sebagaimana isi dari PSPB mengarahkan Soekarno pada hal-hal penyelewengan terhadap UUD 1945. Hal ini sebagaimana dibuktikan dalam GBPP SMA pada tujuan intruksional 3.7 yang menyatakan bahwa tindakan penyelewengan terhadap UUD 1945 merupakan hal yang semena-mena. Tindakan tersebut mengarah pada Soekarno, yang dapat dilihat dalam bahan ajar 3.7.1 yang menyatakan seputar Orde Lama mengenai konsepsi presiden Soekarno. Kemudian bahan ajar 3.7.2 menyatakan Dekrit Presiden dan UUD 1945 kembali lagi. Selanjutnya 3.7.3 Front Nasional dalam pembentukannya. Bahan ajar 3.7.4 pembentukan baru DPR Gotong-royong. Terakhir bahan ajar 3.7.5 yang membahas mengenai sidang pertama MPR.

Jika dilihat lebih lanjut isi dari bahan ajar PSPB tersebut sangat terlihat bahwa upaya Soekarno terhadap perjuangan bangsa Indonesia telah dihilangkan. Hal ini akan memberikan pandangan kepada siswa bahwa peran Soekarno mulai dari pembentukan Dewan Gotong-royong, Dewan-dewan Nasional, pembentukan Nasakom merupakan sikap yang tidak sesuai dan dianggap menyimpang dari UUD 1945. Dalam Nasakom juga disinggung didalamnya bahwa telah memberikan persatuan antara komunis, nasionalis, dan juga agama, dimana hal itu yang telah memberikan gerak luas PKI untuk bergabung dan berperan dalam pemerintahan. Hal semacam itulah yang dianggap sebagai hal yang berseberangan dengan ideologi Pancasila karena telah menggandeng pihak komunis yang tidak memiliki Tuhan. Disini sangat berbeda dengan Orde Baru dimana Orde Baru telah melaksanakan ideologi Pancasila secara murni dan konsekuen tanpa menyimpang (Safitri, 2016). Hal ini sengaja dilakukan supaya generasi muda memiliki pikiran bahwa Soekarno telah menyimpang dan tidak melaksanakan kebijakannya sesuai dengan apa yang semestinya. Tidak seperti Orde Baru yang baik dengan segala kebijakan berdasar keutuhan Pancasila yang murni. Siswa akan menganggap bahwa Soekarno berperan “kurang” dalam memerintah, dan Soeharto (Orde Baru) sangat tepat jika dijadikan presiden berulang kali. Padahal Soekarno merupakan pemimpin yang bukan sembarang pemimpin, beliau lah yang telah menyatukan bangsa dan berjasa dalam kemerdekaan 1945. Peristiwa seperti inilah yang perlahan akan hilang di tengah pemikiran generasi muda, karena ia dikaburkan pandangan yang sangat kompleks yang hanya menceritakan sisi subyektif dari Orde Baru dan tidak membahas realitas terhadap Orde Lama.

Dari beberapa poin diatas mulai Pancasila, G30S sampai Militer sangat memberikan pandangan bahwa semua isi konten materi PSPB sangat mempengaruhi pemikiran peserta didik. Hal ini memberikan dampak pada “kemacetan” pola pikir peserta didik untuk digiring pada membenaran kekuasaan pemerintah Orde Baru. Materi yang berisi mulai dari kemerdekaan tidak menuliskan peran Soekarno sekalipun dalam Orde Lamanya. Pada Orde Lama yang disoroti hanya penyelewengan UUD 1945 pada Nasakomnya. Orde Lama sengaja dihilangkan dari pengembangan Historiografi, sedangkan Orde Baru ditulis secara dalam untuk memperkuat rezim pemerintah dalam politik barunya. Hal ini akan memberikan kecenderungan bahwa warisan dari Orde Lama dilegitimasi oleh pemerintah Orde Baru. Seharusnya milik dari Orde Lama digeser penuh dengan penekanan kebaikan pada Orde Baru (Seran, 2015). Hal semacam inilah yang akan

menggiring peserta didik untuk percaya dan yakin secara penuh bahwa pemerintah Orde Baru lah yang bisa memberikan dampak baik bagi kemajuan Indonesia kedepannya. Hal ini sangat benar bahwa awal pembentukan PSPB telah didasarkan pada keputusan MPR karena pada dasarnya terselubung praktik politik yang memang sangat membutuhkan keputusan politik yang kuat di dalam sidang MPR 1982 (Nurrahmi, 2018)

Jika dilihat keseluruhan dari materi PSPB lebih mengedepankan perjuangan fisik belaka. Hal ini telah memperparah dan mengacaukan pemikiran generasi muda Indonesia. Generasi muda hanya mengetahui kalau sejarah bangsa itu direduksi seputar sejarah militeristik. Kata pemberontakan, perang, perjuangan, perlawanan, pertempuran sangat diakrabkan kepada generasi muda untuk mengetahui peristiwa sejarah bangsa di masa lalu. Kata tersebut seolah menjadi kunci agar generasi muda memiliki jiwa yang patriotisme, heroisme, dan rela berkorban dalam menghadapi pemberontakan-pemberontakan asing seperti perlawanan Jepang di Indonesia sampai pada proses kemerdekaan. Bagi generasi muda sejarah bangsa Indonesia hanya merupakan sejarah perang, pertumpahan darah yang kejam, konflik, dan selalu pada perselisihan. Hal inilah yang akan mengacaukan pemikiran generasi muda yang seolah-olah akan membenci pihak-pihak terdahulu yang menjajah Indonesia. Sampai sekarang pun generasi muda banyak yang salah pemahaman dengan ia tetap masih membenci pihak asing yang pernah menjajah Indonesia dengan alasan kekejaman, dan kebrutalannya terhadap bangsa Indonesia (Naredi, 2014). Dengan itu inilah yang menjadikan kesadaran peserta didik terhadap sejarah itu menurun karena salah pemahaman terhadap pelajaran sejarah.

## Simpulan

Perkembangan kurikulum tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan pemerintah. Pendidikan sangat kental dengan praktik politik yang mewarnai garis kehidupan. Sebagaimana dalam kurikulum sejarah, perubahan kurikulum yang seharusnya berubah kearah yang lebih baik justru bersemayam praktik politik yang memberikan dampak terhadap generasi muda. Hal ini dapat dilihat dalam kurikulum 1984 dimana kurikulum ini memasukkan materi PSPB untuk kepentingan penguasa. Kurikulum dan materi yang seharusnya dapat memperbaiki keberhasilan peserta didik, justru bertindak sebaliknya demi kepentingan para penguasa sendiri.

Masuknya PSPB sangat terbukti terselubung praktik politik dalam pendidikan. Materi yang disuguhkan seputar peran penguasa Orde Baru mulai dari kemerdekaan sampai masa Orde Baru sendiri. Anehnya Orde Baru terdapat suatu hal yang menjelekkan, seperti menuduh PKI, menuduh Jenderal, dan menyinggung negatif mengenai Soekarno. Hal ini sangat berbeda dengan Orde Baru, dimana peran penguasa Orde Baru sangat disinggung baik dan diunggulkan di dalamnya. Kondisi seperti ini yang bersifat sangat melegitimasi karena berusaha menghilangkan peran sebelumnya dan mengambil peran untuk dijadikan milik kekuasaan Orde Baru sendiri. Selain itu materi PSPB juga sangat kental dengan perjuangan fisik, dimana siswa akan dikaburkan pandangan bahwa sejarah merupakan sejarah yang berkonteks perang, dan perang. Generasi muda juga akan dibuat benci pada penjajah-penjajah yang berperang melawan bangsa Indonesia, karena disinggung jahat dalam materi PSPB. Disinilah yang akan memperparah pemahaman generasi muda, bukan tumbuh menjadi siswa yang siap di masa depan, tetapi malah tetap dengan sifat kedendamannya.

Hegemoni lain juga dapat ditemukan dalam ideologi, dimana penguasa berusaha menjadikan Pancasila sebagai tameng perlindungannya. Apa-apa kebijakan pemerintah selalu dikaitkan dengan ideologi Pancasila. Apabila terdapat kebijakan yang dilanggar, generasi muda maka akan dianggap tidak sesuai dan tidak patuh sebagai bangsa Indonesia. Dengan itu dapat dikatakan bahwa perubahan kurikulum ini tidak berjalan sesuai fungsinya. Kurikulum dalam materinya (PSPB) hanya dijadikan sebagai pemenuh untuk mempertahankan kedudukan kekuasaan belaka. Kurikulum yang seharusnya sebagai pedoman pendidikan yang siap membantu masalah di sekolah, membentuk watak generasi muda yang sebenarnya justru lebih mengesampingkan hal itu,

akan tetapi yang lebih dikedepankan adalah misi politik dengan sangat nyata dan lancarnya. Peserta didik selalu disuguhkan dengan kebaikan-kebaikan Orde Baru, selalu dibuat yakin bahwa Orde Baru adalah yang layak dari pemerintah sebelumnya, bahwa Orde Baru adalah yang paling berani melawan penjajahan di Indonesia. Dengan itu peserta didik akan meyakini keadaan tersebut dengan sangat baik, karena materi yang dikemas dalam PSPB sangat tersusun rapi tanpa tahu akan misi politiknya. Dengan itu setelah diungkap dan dilihat secara nyata dan gamblang, bahwa materi PSPB ini mengemban misi politisasi yang kuat dalam mempertahankan kekuasaan pemerintah Orde Baru. Tanpa disoroti betul peristiwa dibalik ini mungkin banyak generasi muda yang salah pemahaman terkait bangsanya sendiri, dan mungkin generasi muda akan selalu benci dan memiliki balas dendam jika dikaitkan dengan kata penjajah di Indonesia. Karena pada dasarnya sedari duduk di bangku sekolah masih mengental dan teringat di memori kolektif peserta didik akan suguhan materi PSPB tersebut. Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan hanya mempengaruhi pemikiran generasi muda akan tetapi juga memicu sifat buruk berupa kebencian yang mendalam terhadap seseorang.

Harapan kedepannya semoga pemerintah dalam kebijakannya benar-benar mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik di sekolah, supaya bisa mencetak generasi unggul dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Selain itu juga diharapkan agar tidak ada lagi oknum-oknum pemerintah yang mengedepankan kepentingannya dibandingkan kepentingan pendidikan yang berguna bagi seluruh bangsa. Karena sejatinya pendidikan yang berhasil harus dilakukan dengan tindakan pemurnian yang sebenarnya, bukan dilakukan atas dasar kepentingan pribadi semata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alam, L. (2020). Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi. *Ruhama: Islamic Education Journal*, 3(2).
- Batubara, U. N. (2019). Perkembangan Pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan-Reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1), 14–34.
- Budiono, H., & Awaludin, A. F. (2017). Perkembangan historiografi buku teks sejarah di indonesia masa orde baru hingga reformasi. *Efektor*, 4(2), 36–43.
- Fareza, M. (2016). Dampak kebijakan perekonomian era orde baru terhadap pembangunan di Indonesia. *Pendidikan Sejarah, UPY*.
- Hadi, N. (n.d.). Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) Dan Deskonstruksi Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru.
- Hartono, Y. (2017). Model pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa di Indonesia dari masa ke masa. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(01).
- Hendra Kurniawan. (n.d.-a). Mengkritisi Sumber Belajar Sejarah Peristiwa 1965: Antara Kepentingan Politik dan Ilmiah.
- Hendra Kurniawan. (n.d.-b). Mengkritisi Sumber Belajar Sejarah Peristiwa 1965 : Antara Kepentingan Politik dan Ilmiah.
- Kusuma, S. P. (n.d.). Perspektif Pengajaran Sejarah di Indonesia. *PATTINGALLOANG*, 7(1), 110–118.
- Naredi, H. (2019). Pendidikan sejarah perjuangan bangsa (pspb) dan dekonstruksi sejarah indonesia pada masa orde baru. *HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 3(1), 1–10.
- Nurrahmi, F. (2018). HEGEMONI IDENTITAS NASIONAL DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA PADA MASA ORDE BARU. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 23(2).

- Priarni, R., Yaqin, A., & Imron, A. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam Era Reformasi Di Indonesia. *An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 100–109.
- Purwanta, H. (2013). *Militer dan Konstruksi Identitas Nasional: Analisis Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Masa Orde Baru*. Paramita: *Historical Studies Journal*, 23(1).
- Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan*, 9(2), 36–42.
- Safei, H., & Hudaidah, H. (2020a). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *J Humanit*, 7(1), 1–13.
- Safei, H., & Hudaidah, H. (2020b). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1–15.
- SAFITRI, R. I. A. W. (2016). Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968-1998. *Avatara*, 4(3).
- Safitri, R., & Purwaningsih, S. (2016). Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968-1998. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 644.
- Sardiman, A. M., & Yuliantri, R. D. A. (2012a). *Dinamika Pendidikan pada Masa Orde Baru: Kebijakan Daoed Joseof dan Nugroho Notosusanto*. Unpublished Research Report. Yogyakarta: FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta]. Available Online Also at: [Http://Staff. Uny. Ac. Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Rhoma% 20Dwi](http://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Rhoma%20Dwi) [Accessed in Surakarta City, Indonesia: October 9, 2017].
- Sardiman, A. M., & Yuliantri, R. D. A. (2012b). *Dinamika Pendidikan pada Masa Orde Baru: Kebijakan Daoed Joseof dan Nugroho Notosusanto*. Unpublished Research Report. Yogyakarta: FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta]. Available Online Also at: [Http://Staff. Uny. Ac. Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Rhoma% 20Dwi](http://Staff.Uny.Ac.Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Rhoma%20Dwi) [Accessed in Surakarta City, Indonesia: October 9, 2017].
- Seran, A. (2015). Dua Versi Satu" Fakta" Sejarah? Hermeneutika Sebagai Acuan Kritik Ideologi Sejarah Orde Baru. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 20(02), 31–71.
- Sulthon, S. (2014). Dinamika Pengembangan KuriKulum Ditinjau Dari Dimensi Politisasi PenDiDikan Dan eKonomi. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1).
- Suparjan, E. (2020). Perubahan Kurikulum Pendidikan Sejarah Di SMA (1994-2013). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).
- Swarinoto, D. M., & Umasih, U. (n.d.). Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) di Sekolah Menengah Pertama 1983-1993. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 6(1), 119–126.
- Syafutra, W. (2016). Implementasi Kebijakan Nugroho Notosusanto dalam Pengajaran Sejarah di SMA (1983-1985). *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 12(2).